

BAB IV

IMPLEMENTASI KHITTAH:

DINAMIKA EKSTERNAL

Jika pada bab III dibahas tentang dinamika internal NU, maka dalam bab ini akan dilihat bagaimana dinamika eksternal NU dalam implementasi keputusan kembali kepada Khittah 1926. Pertama akan dibahas tentang reorientasi politik yang membawa NU pada dimensi baru gerakan politiknya, yang memiliki dua makna penting; ditinggalkannya politik praktis, dan dilepaskannya keterikatan dengan organisasi politik manapun. Pada bagian yang sama akan dilihat pula bagaimana posisi NU pada dua pemilu, 1987 dan 1992. Kemudian, aktivitas bidang garapan NU setelah tidak lagi berkonsentrasi pada kepolitikan praktis akan menjadi topik bahasan, sebelum bab ini ditutup dengan tinjauan mengenai keuntungan dan kerugian NU pasca Khittah.

A. DARI KUANTITAS, KE KUALITAS POLITIK: *SEBUAH REORIENTASI*

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan Bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama secara sadar mengambil posisi yang aktif dalam proses perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945 dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Keberadaan Nahdlatul Ulama yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdlatul Ulama dan segenap warganya untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945. Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh persaudaraan (al-ukhuwah), toleransi (al-tasamuh), kebersamaan dan hidup berdampingan baik bersama dengan umat Islam maupun dengan sesama warganegara yang mempunyai keyakinan/agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.

Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan, Nahdlatul Ulama senantiasa berusaha secara sadar untuk menciptakan warga negara yang menyadari akan hak dan kewajiban terhadap bangsa dan negara.

Nahdlatul Ulama secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga.

Setiap warga Nahdlatul Ulama adalah warga negara yang mempunyai hak-hak politik yang dilindungi dengan Undang-undang. Di dalam hal warga Nahdlatul Ulama menggunakan hak-hak politiknya harus dilakukan secara bertanggung-jawab, sehingga dengan demikian dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum, dan mampu mengembangkan mekanisme musyawarah dan mufakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi bersama¹

Kutipan panjang di atas adalah sebuah *blueprint* kepolitikan NU pasca khittah yang dirumuskan dalam muktamar 1984. Ada dua hal penting yang dipancarkan dalam rumusan itu. *Pertama*, penegasan tentang dimensi baru gerakan politik NU, yang tidak lagi memiliki muatan politik praktis

¹Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama NO. 02/MNU-27/1984 tentang Khittah Nahdlatul Ulama, Butir 8.

kelembagaan. Kedua, penegasan netralitas NU terhadap setiap organisasi politik.

Dimensi baru kepolitikan NU adalah resultansi dilakukannya reorientasi dalam kuantitas politik menuju kualitas politik.² Maka reorientasi itu adalah, NU meninggalkan politik praktis dan politik kelembagaan yang berkutat pada perhitungan berapa banyak perolehan suara dalam pemilu, berapa banyak orang NU yang menduduki jabatan dalam supra struktur, dan seterusnya. Ukuran "sukses politik" NU kini bukan lagi segi kuantitatif semacam itu, tapi lebih pada sejauh mana pikiran-pikiran, konsep-konsep NU, serta para warga NU di lembaga-lembaga politik yang ada bisa memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, adalah tujuan NU kini untuk memiliki nilai komplementer bagi usaha pembangunan bangsa.³ Lalu netralitas politik, artinya NU melepaskan afiliansinya terhadap PPP untuk selanjutnya menjaga *equal distance* terhadap keseluruhan OPP.

²Sementara pengamat dengan terburu-buru menafsirkan bahwa reorientasi yang dilakukan NU adalah reorientasi dari peran politik menuju peran non-politik. Meskipun sampai batas tertentu ada benarnya pula, tapi penafsiran seperti ini akan menyulitkan para pengamat tersebut untuk menemukan ekspansi paling tepat manakala mereka menemukan masih adanya bobot-bobot politik dalam gerakan NU ini.

³Wawancara penyusun dengan Drs. Khairul Anam, Ketua GP. Anshar Jawa Timur di kediamannya pada tanggal 03 Juli 1997.

Segala komitmen di atas barangkali secara konseptual sudah sangat jelas. Tetapi implementasinya sudah pasti tidak akan semudah dirumuskan. Jelas itu adalah, seperti diakui oleh Abdurrahman Wahid, "merupakan statemen yang kompleks (meskipun) kelihatannya sederhana".⁴ Kompleksitas persoalannya segera membayang secepat hal itu diputuskan.

Naro, rupanya menyadari bahwa keluarnya NU dari PPP berarti hilangnya sumber massa terbesar partai itu, di Pontianak tanggal 9 Januari 1985 menyatakan bahwa organisasi yang turut menandatangani deklarasi pembentukan PPP secara yuridis formal tetap mempunyai hubungan dengan PPP.⁵ Yang dimaksud Naro tidak lain adalah NU.

Maka, Abdurrahman Wahid merasa perlu menanggapi ucapan Naro itu. Seusai Rapat Gabungan pengurus harian PBNU di Jombang, 11 Januari 1985, ia menyatakan bahwa warga NU tidak otomatis menjadi anggota PPP, sambil merujuk pernyataan Naro sendiri bahwa keanggotaan PPP adalah *stelsel aktif*.⁶ Sementara rapat gabungan itu menghasilkan

⁴Lihat Abdurrahman Wahid, *Nahdlatul Ulama dan Khittah 1926*, dalam Masykur Amin dan Ismail Ahmad (eds.), *Dialog Pemikiran Islam dan realitas Empirik* (Jogjakarta: LKPSM, 1993), h. 152.

⁵Lihat *Kompas*, 10 Januari 1985.

⁶*Kompas*, 12 Januari 1985.

sebuah keputusan yang menegaskan netralitas NU. SK PBNU No. 01/PBNU/I-1985 tentang Pelarangan Perangkapan Jabatan mengatur bahwa semua pengurus harian NU di semua tingkatan, tidak boleh merangkap menjadi pengurus harian orpol manapun. Batas waktu pelaksanaan larangan itu adalah satu tahun untuk tingkat Wilayah, dan dua tahun untuk cabang. Keputusan itu belakangan dikukuhkan lagi dengan SK PBNU No. 72/A-II/04-d/XI/1985.

Pada bulan berikutnya, delapan orang pengurus Harian PBNU menemui presiden Suharto di Bina Graha.⁷ Di sini mereka melaporkan hasil-hasil Muktamar 1984, termasuk penerimaan azas tunggal yang dinyatakan semata-mata karena motivasi agama dan bukan politik. Pembicaraan lain yang memperoleh aksentuasi dalam pertemuan itu adalah pandangan NU bahwa Negara Republik Indonesia merupakan bentuk final bagi keseluruhan bangsa, terutama umat Islam. Tentang netralitas NU, dikabarkan bahwa Presiden memberikan tanggapan sangat positif, dan menyatakan harapannya agar sebagai perorangan warga NU benar-benar bisa memasuki semua

⁷Kedelapan pengurus harian yang tanggal 14 Februari diterima presiden itu adalah KH. As'ad (Mustasyar Aam), KH. Ahmad Siddiq (Rais Aam), Abdurrahman Wahid (Ketua Tanfidziyah), Anwar Nurris (Sekjen), Mahbub Djunaedi (Wakil ketua Tanfidziyah), KH. Rusdi Shaleh (Wakil Rais Aam), KH. Najib Wahab (Rais Syuriah), dan KH. Hamid Widjaja (Katib Syuriah).

kekuatan sosial politik lain.⁸

Pertemuan itu setidaknya dapat dijadikan langkah pertama bagi rekonsolidasi dengan pemerintah yang merupakan salah satu dari sub-tema khittah. Bagi NU, perjalanan selama lebih sepuluh tahun dalam PPP yang kadang menempatkannya sebagai oposan pemerintah, sedikit-banyak tentu terasa sebagai deviasi dari pola pandangan tentang hubungan dengan penguasa. Di sini pemerintah sendiri, pada saat yang nyaris bersamaan dengan retrospeksi NU, mulai muncul kecenderungan politik yang akomodatif terhadap umat Islam, setelah sebelumnya antara kedua belah pihak terdapat hubungan yang antagonistik bahkan menjurus ke arah konflik. Rupa-rupanya, pemerintah menyadari bahwa umat Islam merupakan kekuatan politik potensial jika dapat mengorganisir diri sedemikian rupa. Sehingga pemerintah akhirnya dihadapkan pada dua pilihan: mengadakan akomodasi terhadap Islam, atau menempatkan Islam sebagai kelompok yang berada diluar sama-sekali. Tampaknya pemerintah mengambil pilihan pertama, sebab kalau kedua yang dipilih, konflik akan sulit dihindari, yang pada akhirnya membawa dampak yang besar dalam proses pemeliharaan negara

⁸Kompas, 15 Februari 1985.

kesatuan.⁹

NU setelah menyadari perkembangan itu, dan segera mendapati bahwa retrospeksi dan reorientasi politiknya sedang memperoleh iklim makro yang tepat.¹⁰ Maka rekonsolidasi dengan pemerintah pun di akselerasi penuh. Di hadapan sekitar 10.000 warga NU pada HUT-nya yang ke-61 di Surabaya, 28 April, Abdurrahman Wahid mengingatkan bahwa masih banyak kaum muslimin yang belum memahami masalah hubungan negara dan agama secara benar. Mereka masih mempertentangkan Islam dengan negara. Maka adalah tugas warga NU untuk mengoreksi kesalah-pahaman itu.¹¹ Lalu sambil mengulang-ulang bahwa secara kelembagaan telah meninggalkan kegiatan politik praktis, Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa operasionalitas keputusan itu adalah netralitas NU terhadap orpol yang ada.

Repetisi terhadap penegasan itu barangkali memang

⁹Lihat Afan Gaffar, **Politik Akomodasi: Islam dan Negara di Indonesia**, dalam M. Imam Azis, et. al (eds.), **Agama Demokrasi dan Keadilan** (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 105.

¹⁰Kesesuaian langkah Politik NU dengan rekayasa politik pemerintah kian terasa dengan diterapkannya UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 17 Juni, yang pada pasal 2 menyatakan bahwa, Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas, walaupun tetap dibebaskan untuk merumuskan tujuan khas masing-masing. Lihat antara lain, **5 Undang-undang Baru di Bidang Politik** (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

¹¹Kompas, 29 April 1985.

diperlukan, karena dalam pada itu sejumlah tokoh NU seperti Mahbub Djunaedi, KH. As'ad Syamsul Arifin dan Anwar Nurris masih melakukan campur tangan dalam persoalan PPP. Antara bulan Maret dan Juni mereka melakukan serangkaian usaha untuk mendepak Naro dari kepemimpinan PPP, atau minimal menggesernya dari posisi dominan, sambil berusaha menempatkan orang-orang NU pada jabatan-jabatan kunci partai. KH. As'ad Syamsul Arifin bahkan mengancam bahwa jika tidak ada perbaikan dalam kepemimpinan PPP, dia akan melarang ulama NU berkampanye bagi partai itu dalam pemilu 1987 kelak.¹² Ketika menemui bahwa semua itu gagal, Mahbub Djunaedi yang mewakili KH. As'ad Syamsul Arifin mengeluarkan pernyataan bahwa dalam pemilu nanti warga NU tidak wajib berkampanye untuk PPP dan tidak pula wajib mencoblos PPP.¹³

Melihat gerak maju-mundur ini, Abdurrahman Wahid secara implisit memperingatkan para elit NU agar membiarkan warga dalam kebebasan untuk menentukan pilihan politiknya sendiri, dan untuk menjaga NU murni dalam netralitasnya. Dia juga mengingatkan bahwa KH. As'ad Syamsul Arifin

¹² Tentang campur tangan sejumlah tokoh NU itu lihat antara lain Tempo, 30 Maret 1985 dan 22 Juni 1985.

¹³ Pelita, 31 Oktober 1985, sebagaimana dikutip dalam Kacung Marijan, Quo Vadis NU (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), h. 160.

sendiri yang sejak sebelum Mukhtamar 1984 telah berbicara tentang netralitas NU.¹⁴

Tetapi Mahbub Djunaedi lalu menjawab bahwa NU tidak bisa begitu saja netral terhadap kebaikan dan keburukan. NU --yang dia maksud sebagai lembaga-- harus mempunyai pilihan, karena NU memiliki nilai-nilai yang jadi patokan. Baginya, netralitas itu mengesankan kelemahan dan cenderung mau enak-enakan ... melayang-layang, tidak punya pijakan baik di bumi maupun di langit. Mahbub Djunaedi lebih menyukai istilah bebas aktif (yang) punya pijakan, punya hitungan dan punya resiko.¹⁵ Lalu tentang implikasi politik khittah, Mahbub Djunaedi dengan ilustratif menggambarkan bahwa yang ditinggalkan NU dari dunia politik adalah "perolehan minimal" untuk menuju "perolehan maksimal".¹⁶ Itu berarti NU mesti melakukan apapun yang diharuskan oleh upaya untuk mencapai perolehan maksimal itu. Dan akhirnya,

¹⁴Kompas, 4 Nopember 1985.

¹⁵Lihat Mahbub Djunaedi, Muballig Dadap tentang Netralitas NU, dalam Kompas, 20 Desember 1985.

¹⁶Mahbub Djunaedi, Khittah, dalam Tempo, 25 Januari 1986, h. 76. Mahbub Djunaedi mengingatkan generasi baru NU agar tidak lagi dengan biduk kecil seraya menentang seikat ikan, cukup untuk makan sehari-semalam tapi tidak cukup menambal bilik rumah yang rombeng. Anak-anak itu tidak bisa dibiarkan sama seperti orang tuanya. Mereka mesti memandang laut dengan sinar mata yang baru, membawa pulang berton-ton ikan yang sehat, mencegah binatang itu mati tua karena tidak ada tangan yang kuasa menangkapnya. Ibid

jalan pikiran diatas, kemudian mengantarkan Mahbub Djunaedi dan kelompoknya pada apa yang kelak dikenal sebagai aksi "penggembosan PPP", tanpa mengabaikan faktor determinan lain berupa kekecewaan terhadap pimpinan PPP saat itu, khususnya Naro.

Kekecewaan kepada PPP inilah yang memasuki tahun 1986 mulai disebut-sebut sebagai alasan utama ketika terjadi hijrah warga NU ke Golkar secara demonstratif, terutama di Jawa Tengah dan Barat. Di Jawa Tengah misalnya, dari 37 cabang NU yang ada, sampai bulan Mei tinggal 8 cabang saja yang masih jelas-jelas mendukung PPP.¹⁷ Pada umumnya mereka menganggap bahwa kemenangan PPP di suatu daerah selama ini tidak membawa perbaikan apapun, termasuk sarana keagamaan. Yang banyak mengembangkan sarana itu justru adalah Golkar. Sedangkan KH. Ilyas Ruhiyat (Pesantren Cipasung, yang sejak 1992 menjadi Pelaksana Rais Aam NU) memberikan alasan bahwa yang selama ini menguntungkan NU adalah kerja sama dengan umara (pemerintah), dan sekarang umara adalah identik dengan Golkar.¹⁸

Sebenarnya, tanpa adanya manuver-manuver politik yang tendensius dari kelompok tertentu di NU sekalipun, langkah-langkah politik obyektif NU pada umumnya memang banyak

¹⁷Lihat Tempo, 31 Mei 1986.

¹⁸I b i d.

berimplikasi negatif terhadap PPP. Di Jawa Timur, SK PBNU no. 72 tahun 1985 tentang pelarangan perangkapan jabatan banyak ditafsirkan sebagai perceraian NU dari PPP. Lalu di tahun 1986, PBNU mengeluarkan SK No. 92/1986 yang melarang pengurus harian NU serta pengurus lembaga, lajnah, dan badan otonom di tingkat MWC dan Ranting untuk menjadi komisaris orpol, maupun mewakilinya dalam berbagai tingkat aparaturnya pemilu. Akibat SK ini, PPP Jawa Timur menjadi kedodoran. Hampir semua DPC PPP mengeluhkan sulitnya mencari tenaga Pengawas Pemungutan Suara dan Panwaslakcam. Di Bondowoso bahkan terjadi kesulitan untuk mendapatkan orang bagi jabatan komisaris partai baik di tingkat kecamatan maupun desa. Kesulitannya adalah karena di Jawa Timur pengurus harian PPP lazimnya adalah orang-orang NU, sehingga pasti ada yang bisa tetap aktif di PPP, namun di kalangan warga NU ternyata berkembang kebencian terhadap Naro. Akibatnya, ulama NU yang diketahui menjadi pengurus PPP langsung di cap sebagai antek Naro dan di jauhi masyarakat. Dalam konteks inilah KH. Syamsuri Badawi (Tebuireng) menyalahkan PBNU, yang menurutnya telah menyesatkan umat Islam dengan segala macam larangan yang diberlakukan. Dia juga menyerukan warga NU tetap di PPP, sebab rumah Islam adalah di PPP, yang meskipun dasarnya adalah Pancasila, namun AD/ART-nya masih menyebutkan untuk

memperjuangkan Islam.¹⁹

Untuk menetralsir suasana, KH. Ahmad Siddiq di bulan Juni mengumpulkan 250 ulama se-Jawa Timur, dan dalam kapasitasnya sebagai Rais Aam, ia membuat fatwa tentang pemilu. Fatwa itu berisikan dua hak pokok. *Pertama*, warga NU tidak lagi wajib memilih PPP, dan tidak dilarang memilih Golkar dan PDI. *Kedua*, mereka mewajibkan menggunakan hak suaranya dalam pemilu, dan diharamkan menjadi golput.²⁰ Di bulan Oktober, fatwa itu dipublikasikan sebagai sebuah buku "NU dan Pemilu", yang disamping diedarkan kepada warga NU juga dikirimkan kepada 200 bupati di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan, yang wilayahnya adalah basis NU.²¹

Implikasi-implikasi negatif terhadap PPP itu sebenarnya diperuncing oleh sikap Naro. Semakin mendekati pemilu, dia sering berbicara bahwa NU tetap di PPP, dan umat NU adalah umat PPP. Bagi mereka yang kerap merasakan kekecewaan saat NU masih berada di PPP, yang untuk sebagian adalah akibat tindakan Naro, maka ucapan-ucapannya belakangan jadi terasa hipokrit dan berkesan hendak memeralat NU untuk menjamin perolehan PPP. Barangkali jika Naro bersikap wajar dan menghargai keputusan NU, maka NU

¹⁹Lihat Tempo, 15 Februari 1986, h. 12..

²⁰Tempo, 19 Juli 1986.

²¹Tempo, 1 Nopember 1986.

pun akan bersikap wajar. Sebab ikatan historis mereka pastilah tidak begitu saja dapat diputuskan. Namun semua perkembangan yang terjadi mendorong kelompok tertentu dalam NU untuk membuktikan bahwa PPP akan sangat berbeda setelah ditinggalkan NU.

Bahkan Abdurrahman Wahid pun akhirnya melihat bahwa aksi penggembosan kepada PPP pada satu segi akan menguntungkan NU dalam usaha menegaskan eksistensi dirinya. Sehingga ketika intensitas penggembosan itu meninggi, dia sama sekali tidak berusaha lagi untuk mencegahnya, dan hanya sesekali, dengan tidak sungguh-sungguh, membuat pernyataan yang tidak terlalu berarti seperti bahwa aksi penggembosan itu adalah tindakan individual orang-orang NU yang tidak puas dengan kepemimpinan PPP, dan bukan tindakan NU.

Memasuki tahun 1987, di Jawa Timur dan Jawa Tengah kampanye penggembosan mulai dilakukan secara terkoordinir,²² yang dilakukan dengan intensif melalui pengajian dan ceramah. Di Jawa Tengah, Ketua FWNU Bakhari Masruri bersama tokoh berpengaruh antara lain, KH. A. Hamid Baidlowi aktif melakukan penggembosan. KH. A. Hamid

²²Di dua daerah itu penggembosan berjalan dalam intensitas yang sangat tinggi. Boleh jadi karena keduanya adalah daerah-daerah basis utama NU yang dalam dua pemilu telah memompa PPP pasti tahu persis di mana katup untuk mengemboskannya.

Baidlowi bahkan memperluas cakupannya sampai Jawa Timur. Di sini, banyak ulama yang pernah berguru kepada ayahnya, KH. Baidlowi, sehingga dia cukup disegani. Di Jawa Timur sendiri, kampanye penggembosan dilakukan dengan sangat retorik. Wakil Ketua GP Anshar Jawa Timur, HM. Shahib, berbicara bahwa "bukan NU yang keluar dari PPP. Tapi PPP yang mencetat --terlempar-- dari NU. Biar dia tahu rasa. Biar jadi bonsai".²³ Dan PPP dengan sia-sia masih mencoba untuk unjuk gigi. Kehadiran KH. Hamid yang membawa kharisma ayahnya dianggap bukan persoalan bagi mereka. Ahadin Mintarwin, Sekretaris DPW PPP Jawa Timur, mengacungkan apa yang dianggap sebagai kartu truf PPP: KH. Amin Imron yang adalah cucu KH. Kholil kini tetap di PPP, bahkan namanya masuk dalam DCT. KH. Kholil adalah guru sebagian besar ulama-ulama terkemuka di Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk KH. Hasyim Asy'ari.

Akan tetapi apa yang ditempuh PPP, tidak berarti. Dan ditengah keputus-asaannya, Naro sepertinya lepas kendali. Dia kemudian menentang NU: Biar saja telur busuk itu keluar dari partai. Terlalu lama ada dalam keranjang yang baik ini malah akan merusak telur-telur lain yang masih baik.²⁴ Maka kampanye penggembosan lalu kian tidak dapat terbendung.

²³ Tempo, 7 Maret 1987.

²⁴ Tempo, 21 Maret 1987.

Di Jawa Timur, mendekati Pemilu tidak kurang dari 900 pengajian yang dilakukan ulama-ulama NU menyerukan penggemboan. PPP yang merasa sangat tersudut, terpaksa mengeluhkan ini, dan melaporkannya kepada Laksusda. Buntutnya, Kantor Sospol Kotamadya Surabaya melarang 88 orang tokoh NU untuk berbicara di forum pengajian, dan Laksusda meminta agar PWNU Jawa Timur menghentikan penggemboan. Atas rekomendasi Ditsosopol Jawa Timur, beberapa waktu kemudian semua larangan itu dicabut kembali.²⁵

Pada skala nasional, tokoh-tokoh teras PENU yang paling intens melakukan penggemboan selain Mahbub Djunaedi, yang tulisan-tulisannya tidak diragukan lagi adalah metode pengemboan yang paling luas cakupannya, ialah Saiful Mujab, salah seorang Wakil Ketua Tanfidziyah, dan KH. Yusuf Hasyim, Rais Syuriah.

Efek pengemboan sebenarnya sudah mulai terasa sejak masa kampanye pemilu. Suasana pemilu PPP pada umumnya jauh lebih sepi jika dibandingkan dengan pemilu 1982.²⁶ Ini dapat dijelaskan karena sebagian besar massa yang mengikuti kampanye PPP adalah warga NU yang dikerahkan oleh para

²⁵Lihat Kacung Marijan, Op. Cit., h. 168.

²⁶Syamsuddin Haris, PPP dan Politik Orde Baru (Jakarta: PT Grassindo, 1992), h. 119.

kyai, dan pengerahan semacam itu hampir tidak ada lagi dalam kampanye Pemilu 1987.

Sedang kampanye PPP sendiri dapat dikatakan kurang efektif. Di daerah seperti Jawa Timur, hampir separuh waktu kampanye digunakan oleh para jurkam untuk meng-counter penggembosan terhadap partai mereka.²⁷ Selanjutnya, kampanye-kampanye mereka pada umumnya kesulitan mencari tema, setelah asas Islam yang dahulu menjadi andalan tidak lagi dapat dipergunakan. Kunci persoalan akhirnya adalah pada program-program yang ditawarkan. Namun di sini pun PPP kedododran. Mereka jadi tampak mengada-ada tatkala, misalnya, hendak menghapus SPP. Atau seperti di Jawa Barat, PPP kampanye anti pengiriman TKW ke Arab Saudi, padahal di sana terdapat kurang lebih dua juta orang yang menikmati hidup dari keluarganya yang menjadi TKW.²⁸

Dengan kedua perolehan di atas, penggembosan oleh NU serta hilangnya tema ideologis sebagai akibat diterapkannya asas tunggal Pancasila, ditambah lagi dengan kepemimpinan partai yang terus-menerus dilanda kemelut dan konflik sehingga mengakibatkan berpalingnya para pemilih rasional, maka kemerosotan perolehan suara PPP dalam pemilu 1987 bukan suatu yang luar biasa untuk diramalkan. Perhitungan

²⁷ I b i d.

²⁸ Lihat Tempo, 5 Mei 1987.

hasil akhir pemilu ini menunjukkan turunnya perolehan suara PPP di hampir semua daerah pemilihan. Sedangkan total secara nasional, PPP memperoleh 15,96 %, merosot tajam dari perolehan di tahun 1982 yang sebesar 27,78 %. Perolehan kursi di DPR pun merosot dari 94 di tahun 1982 menjadi 61 di tahun 1987. Penurunan ini akan tampak semakin parah jika dilihat bahwa jumlah kursi di DPR telah dieskalasi dari 364 menjadi 400 kursi.²⁹

Jika dapat disepakati bahwa kemerosotan itu adalah karena PPP ditinggalkan oleh warga NU untuk sebagian besar, dan pemilih rasional yang beralih akibat kemelut internal partai itu pada bagian yang lebih kecil, pertanyaan selanjutnya tentu ialah, kemana penyebaran pemilih-pemilih yang berpaling itu ?

Jawaban bagi pertanyaan ini agaknya harus tetap jadi spekulasi. Namun adalah kenyataan bahwa Golkar mencatat kenaikan perolehan suara yang cukup berarti, dari 64,34 % di tahun 1982 menjadi 72,99 % di tahun 1987. Sedangkan PDI menunjukkan sedikit kenaikan dari 7,8 % menjadi 11,01 %. Atau ambillah contoh di Jawa Timur, dimana PPP menunjukkan penurunan sebesar 15,15 % dan sebelumnya kampanye penggemosan berjalan dalam intensitas yang cukup tinggi.

Dari data yang diperoleh dalam hasil pemilu dua tahun

²⁹Untuk angka-angka ini lihat Haris, Op. Cit., h. 120.

diatas, sangat kecilnya warga NU untuk menyeberang ke PDI. Kendatipun ada peluang PDI untuk merangkul NU, namun terdapat hambatan psikis bagi warga NU untuk begitu saja beralih memilih PDI. Citra PDI belum bisa lepas sama sekali dari PNI. Dan bagi kaum santri di NU, citra PNI adalah abangan. Apalagi dalam PDI terdapat unsur-unsur Parkindo dan Partai Katolik. Di Jawa Timur, PDI menunjukkan kenaikan di 25 dari 36 Daerah Tingkat II. Yang terbanyak terjadi di Kotamadya-kotamadya Surabaya, Mojokerto, Malang dan Probolinggo. Berarti kenaikan PDI kebanyakan diperoleh dari masyarakat pemilih perkotaan yang relatif rasional, yang tidak mengaitkan pilihan politiknya dengan pertimbangan-pertimbangan primordial. Indikasi ini diperkuat pula dengan adanya daerah-daerah etnik Madura, yang tidak diragukan lagi adalah warga NU, yakni Bondowoso, Situbondo, Pamekasan, Bangkalan, Sampang dan Sumenep, kenaikan suara PDI berada pada angka di bawah 1 %.

Sebaliknya, di daerah etnik Madura itu pada umumnya PPP menunjukkan adanya kemerosotan terbesar. Misalnya di Sumenep, yang menunjukkan angka prosentase pergeseran terbesar di Jawa Timur, PPP menurun sebesar 31,70 % dan Golkar naik 30,03 %. Sementara di Kotamadya-kotamadya, Golkar justru mengalami kenaikan yang kecil antara 6,29 % hingga 13,59 %. Sehingga gambaran kedua yang dapat dibuat ialah, mungkin sekali, yang untuk sebagian besar adalah

akibat aksi penggemboan, banyak warga NU yang telah mengalihkan suaranya dari PPP ke Golkar.

Sementara itu, segera setelah Pemilu NU mengupayakan rekonsiliasi internal. Tanggal 4 Juni, KH. Ahmad Siddiq mengundang semua tokoh NU yang menyebar di setiap DPP dalam sebuah acara halal bi-halal di Surabaya. Termasuk yang diundang adalah para aktivis penggemboan seperti KH. Yusuf Hasyim dan Mahbub Djunaedi. Namun, tokoh-tokoh NU di PPP, seperti KH. Syansuri Badawi dan Ketua DPW PPP Jawa Timur, Sulaeman Fadli, menolak hadir dalam pertemuan yang diwarnai dengan acara saling memaafkan itu.³⁰

Selanjutnya, hasil-hasil pemilu rupa-rupanya kian meyakinkan kelompok politisi NU akan potensi politik organisasinya. Bagi mereka sudah terbayang bahwa potensi itu akan membuat NU selalu diperebutkan oleh setiap kontestan dalam pemilu-pemilu selanjutnya. Maka lalu muncul gagasan tentang "Khittah Plus", yang merupakan hasil pikiran Mahbub Djunaedi yang paling kontroversial tentang NU. Dalam gagasan ini, Mahbub Djunaedi mengajak warga NU untuk memikirkan kemungkinan NU kembali menjadi partai politik. Menurutnya, apa yang objektif benar ditentukan di Situbondo dahulu belum tentu benar selamanya. Sah saja NU melakukan *think* dan *rethink*, agar tetap dinamis. Tentang

³⁰Lihat Tempo, 13 Juni 1987

hambatan berupa struktur politik yang hanya memperkenankan tiga kontestan politik, dia berargumen:

Bukankah negeri ini sudah berulang kali mengalami penyempurnaan sistem politik yang tunduk pada perkembangan dinamisasi masyarakat ? Bukankah pernah ada pikiran multi-partai, pernah ada pikiran satu partai, dan akhirnya sistem sekarang ?.³¹

Meskipun tampaknya tidak ada yang tidak masuk akal dalam argumen Mahbub Djunaedi ini, namun setidaknya terdapat dua persoalan yang membuat gagasan itu tidak populer. *Pertama*, dia berhadapan dengan hambatan objektif makro seperti yang telah disebutkan sendiri oleh Mahbub Djunaedi, yang sulit untuk berubah dalam waktu dekat. *Kedua*, gagasan itu diartikulasikan terlalu pagi, ketika NU masih didominasi oleh semangat reorientasi politik yang mengharuskan NU meninggalkan kegiatan politik praktis.

Serangkaian upaya lobbying Mahbub Djunaedi untuk meyakinkan gagasannya praktis tidak berhasil. Bahkan Munas Alim Ulama NU di Cilacap, 15-18 Nopember, sekalipun sempat diwarnai perdebatan tentang itu, sama sekali tidak mencantumkan masalah Khittah Plus Mahbub Djunaedi dalam agendanya. Dalam waktu singkat, gagasan Mahbub Djunaedi ini dengan segala variannya, termasuk untuk menggeser

³¹ Mahbub Djunaedi, *Khittah Plus*, dalam Tempo, 7 Nopember 1987.

Abdurrahman Wahid, segera terabaikan, setidaknya untuk sementara.

Sedang Mahbub Djunaedi rupanya harus memikul resiko lain. Dalam Muktamar 1989 dia termasuk orang yang oleh Abdurrahman Wahid disingkirkan dari pos-pos kunci dalam kepengurusan harian PBNU. Namun berbeda dengan Anwar Nurris, yang sama sekali terlempar, Mahbub Djunaedi masih ditempatkan pada posisi yang tidak begitu menentukan sebagai anggota Mustasyar. Rupanya, aksi penggembosan yang pada sisi tertentu berimplikasi positif bagi pembuktian eksistensi diri NU masih dipandang sebagai jasa Mahbub Djunaedi yang untuk itu harus dihargai sepenuhnya.

Muktamar itu juga mengambil pelajaran dari perjalanan selama lima tahun, akhirnya merasa perlu memberikan pedoman bagi warga NU dalam menggunakan hak-hak politiknya. Pedoman itu diakumulasikan dalam sembilan rumusan politik NU:

1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.
3. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan

- dengan moral, etika dan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan bangsa Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berperikeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran murni dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
 6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkuat konsensus nasional, dan dilakukan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlus sunnah wal jamaah.
 7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalil apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah-belah persatuan.
 8. Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dengan suasana persaudaraan, tawaddu' dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu dapat tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
 9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal-balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.³²

Sebenarnya tidak ada yang baru dalam sembilan rumusan politik itu. Pada dasarnya semuanya adalah penegasan kembali dalam detail terhadap *blue print* kepolitikan NU yang diputuskan di Situbondo. Untuk sebagian, rumusan politik itu dimaksudkan sebagai penjelasan bahwa dengan

³²Keputusan Mukhtamar NU no. 06/MNU-28/1989 Tentang Masalah-masalah Kemasyarakatan (Pesan-pesan Mukhtamar), Bab VI.

khittah tidak lalu berarti NU menjadi pasif dan tidak terlibat dalam proses politik. Pada Bulan Agustus, tiga bulan sebelum Muktamar, di depan program Pelatihan Kader NU yang diadakan oleh Lakpesdam, Abdurrahman Wahid berbicara tentang peran politik NU. Dia memastikan, sekalipun bukan Parpol, NU bisa saja punya peran politik sebagaimana organisasi politik maupun organisasi profesional lainnya, sebab NU selalu merasa terpanggil dalam proses transformasi sosial yang tengah dialami bangsa Indonesia. Tapi peran politik setelah khittah tidak lagi identik dengan kekuasaan atau jabatan publik.³³

Tentu lalu dapat dipertanyakan, dengan cara apa NU kini memainkan peran politiknya? Khittah tidak diragukan lagi telah membawa NU pada kedudukan di luar politik praktis yang tidak memungkinkannya terlibat dalam *power politics*. Tetapi, bahwasanya proses politik memiliki sekaligus sisi formal dan informal masih membuka celah bagi peran NU. Jika diamati, kepolitikan NU kini tampaknya mengambil suatu model khas yang aksentuasinya bukan pada mekanisme formal. Cara yang dipakai untuk mempengaruhi kebijakan publik, lepas dari pertimbangan efektivitas, sering disebut-sebut oleh Abdurrahman Wahid sebagai "negosiasi di balik layar".

³³ Lihat Kompas, 8 Agustus 1989.

Kecenderungan inilah yang secara meyakinkan telah teramati oleh Arbi Sanit.³⁴ Dia melihat bahwa NU tetap hadir dalam proses politik nasional dan lokal secara tidak resmi, melalui peran warganya yang menjadi pengurus atau bukan, yang secara umum dapat dikatakan sebagai tokoh. Dengan menggunakan lobi sebagai tehnik utamanya, tokoh NU memperjuangkan aspirasi dan kepentingan warganya secara pragmatis dalam arti mengupayakan seoptimal mungkin diperolehnya konsesi politis dari pihak-pihak dengan siapa tokoh tersebut melakukan interaksi, sehingga kepentingan keagamaan dan kemasyarakatan yang menjadi pusat perhatian, akan terlindungi.

Dengan inilah agakny dapat dijelaskan bahwa mengapa ketika menyatakan ukuran suksesnya politik tidak lagi didasarkan pada kalkulasi kuantitatif berapa jabatan-jabatan politik, pada saat yang sama ternyata NU masih terus memetik manfaat dari kehadiran warganya dalam struktur politik, yang sebagian bahkan secara informal sengaja diperjuangkan. Contoh yang paling jelas adalah ketika NU mendukung warganya untuk dapat menempati posisi-posisi strategis di PPP ketika partai ini melaksanakan Muktamar keduanya, Agustus 1989. Ketika itu NU

³⁴Arbi Sanit, "Politik NU sebagai Organisasi Massa", dalam S. Sinansari Ecip (eds.), NU dalam Tantangan (Jakarta: Penerbit Al-Kautsar, 1989)

memperjuangkan Chalid Mawardi dan Karmani sebagai calon pengganti Naro. Sekalipun usaha ini gagal, dan pengganti Naro adalah dari MI, tetapi NU berhasil menempatkan tiga orangnya (Sulaeman Fadeli, Karmani, dan Imam Sofwan) sebagai anggota formatur diantara tujuh orang yang terpilih. Selanjutnya enam orang NU berhasil duduk dalam kepengurusan harian PPP, termasuk Mathori Abdul Jalil sebagai Sekjen. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan kepengurusan Naro yang hanya mencantumkan lima orang dari NU. Sebaliknya dari pihak MI dalam kepengurusan harian turun dari sembilan menjadi tujuh. Diberitakan bahwa calon-calon NU telah memperoleh semangat dan motivasi dari tiga orang kyai yang selalu mendampingi selama muktamar.³⁵

Kejadian ini mendorong Syamsuddin Haris³⁶ untuk menyimpulkan bahwa NU sedang mengalami godaan untuk kembali berpolitik, sehingga dia mengajukan hipotesisi bahwa keputusan NU untuk menarik diri dari kegiatan politik adalah keputusan sementara, yang cepat atau lambat akan mengalami pengkajian ulang. Sekalipun sampai tingkat tertentu sinyalemen ini ada benarnya, namun beberapa keberatan dapat diajukan kepadanya. Pertama, seperti yang

³⁵Lihat Editor, 9 September 1989.

³⁶Syamsuddin Haris, "NU dan Godaan Politik Menjelang Muktamar ke-28", dalam Kompas, 2 Oktober 1989.

menjadi salah satu tesis kajian ini, NU tidak pernah memutuskan untuk membuang dimensi politik dalam aktivitasnya, dan karena itu frase "godaan untuk kembali berpolitik" masih dapat dipertanyakan relevansinya. Selanjutnya, walaupun yang dimaksud adalah godaan untuk kembali berpolitik praktis, maka asumsi Haris di atas pasti akan segera dicounter oleh NU bahwa persoalan dalam muktamar PPP itu adalah keterlibatan individual orang-orang NU, dan bukan NU sebagai organisasi. Kasus di atas agaknya lebih tepat jika dipahami sebagai bagian dari mekanisme informal NU saat hendak turut ambil bagian dalam proses politik yang sedang berjalan. Dan akhirnya, penyimpulan itu agaknya dibuat setelah keterlibatan tokoh NU dalam PPP diamati di bawah lensa pengamatan yang membuatnya tampak lebih besar dari makna riilnya. Sebenarnya, bukan hanya di PPP NU menunjukkan keterlibatan, namun juga di Golkar seperti yang tercermin dari masuknya Slamet Effendi Yusuf, Ketua GP Anshor, dalam jajaran DPF-nya, dan belakangan di PDI ketika di tahun 1993 seorang kyai NU tercantum dalam formasi kepengurusan pusat dalam partai ini.³⁷ Bahwa di PPP keterlibatan NU jauh lebih besar jika dibandingkan terhadap

³⁷ Menjelang Pemilu 1987, Abdurrahman Wahid di depan masa PDI mengatakan bahwa jika ada warga NU yang aktif di PDI, dia akan mendukung. Sebab PDI "kan kecil, kayak anak yatim. Wajar kalau mengharap warga NU mendukung PDI". Lihat Tempo, 21 Maret 1987.

kedua OPP lainnya, tentu karena ada ikatan historis dan kesamaan tujuan tertentu yang tidak dapat begitu saja dinihilkan antara NU dan PPP.

Dan siapapun tidak akan menyangsikan bahwa PPP sebenarnya tahu persis akan arti penting massa NU baginya. Karena itu, segera setelah perombakan formasi kepemimpinan partai, yang nyaris menghapus sama sekali kubu Naro, PPP memulai langkah untuk kembali merangkul pemilih potensialnya itu. Dalam mana kemudian PPP menemukan bahwa dia tidak sendirian, sebab PDI dan terlebih lagi Golkar ternyata sedang melakukan hal yang sama.

Lontaran kekhawatiran Mahbub Djunaedi di tahun 1987 bahwa NU hanya akan seperti "perawan yang ditarik kian kemari oleh para kontestan" di setiap pemilu,³⁸ dengan segera terasa sangat beralasan. Maka mengantisipasi diilncarnya tokoh-tokoh NU oleh ketiga OPP, entah sebagai *vote getter* maupun calon di lembaga legislatif, dalam rapat Pleno PBNU, 18-29 Mei 1991, dibahas rancangan SK PBNU tentang petunjuk menghadapi Pemilu.³⁹ Rancangan tersebut antara lain mengatur bahwa warga NU, termasuk pengurus harian, boleh dicalonkan oleh orsospol sebagai anggota

³⁸ Mahbub Djunaedi, *Khittah Plus*, Tempo, 2 Desember 1989.

³⁹ Tempo, 25 Mei 1991.

MPR/DPR maupun DPRD. Namun begitu namanya tercantum sebagai calon tetap, dia harus meninggalkan jabatannya di NU. Setelah pemungutan suara selesai dan masuk ke lembaga legislatif, dia kembali memegang jabatannya. Lalu utusan PWNU Jawa Timur mengusulkan agar begitu terpilih sebagai anggota badan legislatif sebaiknya yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya. Akhirnya rapat memutuskan sebuah jalan tengah: mereka yang menjabat sebagai pengurus harian dan terpilih dalam pemilu, dialihkan ke jabatan yang tidak terlalu menentukan. Ketetapan ini juga berlaku bagi pengurus badan otonom, lembaga, dan lajnah di lingkungan NU.

Dalam rapat pleno ini pula, ketua PWNU Jawa Timur Muhammad Thohir dikabarkan telah melobi peserta lain agar kasus keterlibatan Abdurrahman Wahid dalam Forum Demokrasi (FD) dimasukkan dalam agenda rapat. Namun lobi ini tidak berhasil. Rupanya kebanyakan peserta sidang merasa khawatir jika persoalan FD dibicarakan, bisa saja keterlibatan pengurus NU lainnya di ICMI dan MUI turut dipermasalahkan.

Peristiwa besar yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama adalah

B. AKTIFITAS BIDANG GARAPAN PASCA KHITTAH

Kalau ada kekeliruan terbesar yang telah dilakukan NU selama periode aktualisasi peran politiknya, itu pastilah

terabaikannya begitu banyak bidang garapan akibat aktivitas yang terkonsentrasi pada politik semata-mata. Sehingga meskipun NU telah membukukan catatan-catatan gemilang tentang prestasi politiknya, dalam banyak hal lain NU sesungguhnya menyimpan sejumlah kelemahan. Masalah taraf perekonomian kebanyakan warga yang masih lemah, atau masalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia NU, adalah contoh kelemahan itu. Kekeliruan ini mulai diperbaiki ketika politik tidak lagi menyita habis perhatian NU.

Cukup banyak sebenarnya bidang-bidang yang dibenahi NU sejak 1984. Namun disini hanya akan dilihat beberapa bidang garapan terpenting, seperti pengembangan sumberdaya manusia, penataan perekonomian warga, dan pendidikan. Pembahasan dalam bagian ini sangat bersifat teknis dan terasa kurang menarik, namun maksud utamanya adalah untuk membuat gambaran betapa NU telah mengambil manfaat yang cukup besar dari ditinggalkannya kegiatan politik praktis yang memungkinkannya untuk juga memperhatikan bidang-bidang lain.

Bidang yang nampaknya menjadi perhatian pertama dalam pembenahan NU adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Boleh jadi sebabnya adalah karena setelah khittah kelompok cendekiawan mengorbit ke puncak struktur kewenangan NU, sehingga wajar jika *concern* pada masalah sumberdaya manusia terasa sekali. Hanya empat bulan setelah

muktamar Situbondo, berdasarkan SK PBNU No. 16/A-V/04/IV/1995 pada tanggal 6 April 1985 di Jakarta didirikan lajnah pengembangan sumberdaya manusia (lakpesdam) yang berada langsung di bawah PB NU. Lalu pada tanggal 30 Nopember tahun berikutnya bertepatan dengan saat berkumpulnya kawula muda NU DIY dalam acara lokakarya penataan program, di Yogyakarta berdiri badan dengan nama yang sama tetapi akronimnya berbeda, LKPSN, di bawah PW NU DIY. Kedua badan ini pada dataran konseptual melakukan kajian, penelitian, dan penerbitan yang mengarah pada tujuan gerakan transformatif. Sedang pada dataran aksi, secara simultan, dilakukan pelatihan dan pengembangan masyarakat. Lakpesdam misalnya, dimana saat ini bekerja sebelas orang sarjana sebagai tenaga profesional yang bekerja penuh, telah merintis pembuatan Pusat Dokumentasi NU. Arsip-arsip lama NU, termasuk kitab-kitab klasik yang menjadi acuan utama NU, di samping dikirim ke LIPI juga dikirim ke lakpesdam. Di LIPI bahkan, bekerja sama dengan Monash University, arsip-arsip itu telah disimpan dalam bentuk microfilm. Lakpesdam juga telah ratusan kali melakukan fasilitasi dan pelatihan, dari tingkat pusat sampai ke tingkat terbawah, terutama untuk mencetak kader-kader organisasi NU. Di samping itu juga pelatihan ketrampilan dan tenaga profesi yang dikaitkan dengan *pilot project* tertentu; peternakan, pertanian dan seterusnya.

Semua aktivitas ini tentu memerlukan dukungan finansial yang memadai. Namun bagi Lakpesdam hal itu rupanya tidak terlalu menjadi persoalan. Dengan cara kerja yang mirip LSM, Lakpesdam sejak awal telah menjalin kerja sama dengan yayasan-yayasan asing. Misalnya dengan Pathfinder Fund, UNFPA, FISKI atau The Asia Foundation.⁴⁰

Lalu berdasarkan konsepsi tentang pengembangan sumber daya manusia yang pada bulan September 1992 telah disusun oleh Tim Penyusun Konsepsi Pengembangan Sumberdaya Manusia NU, Lapedam merumuskan orientasi penyelenggaraan kegiatannya dalam enam kategori :⁴¹

1. Penelitian dan kajian masalah-masalah keagamaan, kemasyarakatan, pendidikan, budaya dan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan maksud-maksud pengembangan sumberdaya manusia.
2. Pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan wawasan, sikap, dan kemampuan kader, relawan, motivator, dan warga masyarakat agar mampu meningkatkan kreatifitas dan produktifitas yang antara lain dengan jalan : a) Latihan untuk pelatih, b) Latihan tenaga pengembangan swadaya masyarakat, c) Latihan kepemimpinan, d) Latihan manajemen program, dan e) Latihan-latihan yang berkaitan dengan pengembangan program pembangunan sektoral (koperasi, kesehatan masyarakat, usaha industri kecil dan seterusnya).
3. Bimbingan, penyuluhan, dan konsultasi untuk penaksiran kebutuhan, studi kelayakan, perencanaan dan penyelenggaraan serta evaluasi kegiatan-kegiatan yang bersifat perintisan pengembangan masyarakat.
4. Dokumentasi, pelayanan informasi dan penerbitan,

⁴⁰Tempo, 25 Nopember 1989, h. 30.

⁴¹Lihat Bangkit, September-Oktober 1993, h. 70-71.

berupa pengadaan dan tukar-menukar buku, bahan bacaan, buku petunjuk dan panduan latihan serta media berkala untuk pengembangan jaringan kerja antar lembaga.

5. Lokakarya, seminar dan berbagai bentuk pertemuan lain dalam rangka mempertemukan dan saling tukar ide, gagasan dalam rangka mempertemukan dan saling tukar ide, gagasan dan pendapat para ahli dan masyarakat umum dalam aspek dan bidang-bidang tertentu.
6. Usaha-usaha produktif yang sesuai dengan maksud dan tujuan Lakpesdam serta memberikan landasan yang kuat bagi kemandirian kelompok sasaran.

Selanjutnya untuk memperluas jangkauan program yang dilaksanakan, Lapesdam kini memiliki tiga Balai Latihan dan Pengembangan Masyarakat (BLPM), yang masing-masing menangani pelaksanaan program dalam lingkup wilayahnya sendiri. BLPM unit I yang berada di Ujungpandang menangani pelaksanaan program Lakpesdam untuk wilayah Indonesia Bagian timur, dan BLPM unit II di Surabaya untuk wilayah Indonesia Bagian tengah, dan BLPM unit III di Jakarta untuk wilayah Indonesia bagian barat.

Bidang garapan lain yang dekat kaitannya dengan pengembangan sumberdaya manusia adalah pendidikan. Namun berbeda dengan yang disebut pertama, yang secara struktural benar-benar baru dimulai setelah khittah, dibidang pendidikan NU telah sejak lama memiliki lembaga-lembaganya, hanya saja efektifitas lembaga-lembaga itu baru bermakna setelah khittah. NU juga berbeda dengan Muhammadiyah, sekalipun keduanya sama-sama meletakkan pendidikan pada

salah satu titik berat kegiatannya. Di Muhammadiyah, sekolah-sekolah dan belakangan juga pesantren, adalah didirikan oleh organisasi. Namun di NU, sekolah-sekolah pada umumnya, meskipun bukan keseluruhan, adalah milik perorangan atau yayasan. Bahkan jika dilihat dari sejarahnya, NU justru didirikan di pesantren, sebuah lembaga pendidikan. Bagian terpenting dari apa yang dilakukan NU terhadap bidang pendidikannya adalah mengadakan koordinasi. Dan untuk itu NU telah memiliki lembaga yang masing-masing bidang pendidikan NU dalam kategori tertentu.

Untuk bidang pendidikan umum, NU memiliki Lembaga Pendidikan Ma'arif yang mengelola dari taman kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Sedangkan pesantren-pesantren dalam lingkungan NU diletakkan di bawah koordinasi Rabithatul Maahadil Islamiyah (RMI) yang didirikan saat Muktamar NU di Surabaya tahun 1954.

Jika pesantren-pesantren, karena karakter dasarnya yang mandiri, mampu untuk terus berkembang sekalipun untuk kurun waktu yang cukup lama tidak memperoleh perhatian yang memadai, maka pendidikan umum di NU baru menampakkan perkembangan yang pesat setelah 1984.

Hingga saat ini, di bawah LP Ma'arif terdapat tidak kurang dari 3.400 taman kanak-kanak yang diberi nama Raudhatul Athfal (sementara itu Muslimat, dalam jumlah yang

lebih besar, juga mengelola 4.800 taman kanak-kanak), 12.000 lembaga pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan SD), 7.800 perguruan tinggi berupa akademi, sekolah menengah baik umum maupun kejuruan, serta 79 perguruan tinggi berupa akademi, sekolah tinggi, institut, dan universitas.⁴² Untuk sektor pendidikan dasar dan menengah telah disusun sebuah pola pembinaan pendidikan dasar dan menengah yang antara lain membuat panduan kurikulum bagi semua lembaga pendidikan pada tingkat ini. Panduan kurikulum itu disusun berdasarkan kurikulum Depdikbud dan dilengkapi dengan materi tambahan ke-NU-an. Lalu di sektor pendidikan tinggi, dalam pertemuan perguruan tinggi NU se Indonesia di Batu, Jawa Timur, pada bulan Nofember 1993 dibuat kesepakatan untuk mengadakan sebuah forum komunikasi yang akan bertemu setiap enam bulan sekali. Dalam pertemuan yang akan dihadiri oleh 58 perguruan tinggi itu diputuskan bahwa Universitas Islam Malang (Unisma), yang menempati tanah milik LP Ma'arif seluas 4 Hektar serta memiliki 11 fakultas dengan 8.700 mahasiswa dijadikan sebagai model pertontohan bagi perguruan-perguruan tinggi NU lainnya.

Baik sekolah-sekolah maupun perguruan-perguruan tinggi

⁴²Angka-angka ini serta data-data lain tentang aktivitas pendidikan di NU diperoleh dari wawancara Penyusun dengan KH. Drs. Wahid Zaini, SH., salah seorang Pengurus PBNU pada tanggal 04 Juli 1997.

yang berada di bawah koordinasi NU dapat dibagi dalam tiga kriteria. *Pertama*, yang memang sengaja didirikan oleh LP Ma'arif atau kepengurusan NU pada semua tingkatan. *Kedua*, yang didirikan oleh suatu yayasan, dan yayasan itu dibentuk oleh kepengurusan NU atau LP Maarif. Dan *ketiga*, sekolah atau perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh warga NU, baik dalam bentuk yayasan atau dalam bentuk lain (banyak pesantren yang juga memiliki sekolah umum sampai perguruan tinggi di dalamnya), dan menyatakan berafiliasi ke NU. Konsekuensi afiliasi itu adalah NU atau LP Ma'arif membantu pengurusan staf mereka, memberi rekomendasi bagi mereka bahwa sekolah itu berada dalam lingkungan NU dan untuk kepentingan warga NU, memberikan bantuan guru, serta membantu pembenahan kurikulum dan materi pelajaran. Beda antara lembaga pendidikan yang sengaja dibentuk dengan yang sekadar menyatakan afiliaasi ke NU adalah bahwa untuk yang disebut terakhir NU maupun LP Ma'arif tidak memiliki kewenangan mengenai pengangkatan pimpinannya.

Bidang garapan lain yang juga secara tradisional menjadi aktifitas NU adalah dakwah, yang ditangani oleh Lembaga Dakwah NU (LDNU) serta Himpunan Daiyah Muslimat dan Fatayat (Hidmat). Tidak perlu dibahas secara rinci tentang aktifitas dakwah NU ini, kecuali bahwa setelah khittah NU merasakan keleluasaan dalam berdakwah, yang tidak mudah diperoleh ketika NU masih berpolitik praktis.

Sebuah langkah yang tidak terlalu menonjol, antara lain karena cakupannya yang bersifat lokal pada tingkat wilayah NU, namun tetap perlu dicatat karena merupakan sebuah terobosan baru adalah dibentuknya Lajnah Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) pada kepada warga NU dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Tiga program umum yang diembannya adalah pelayanan ligitasi, pelayanan jasa konsultasi dan pelayanan non ligitasi. Ketiga program umum itu dilaksanakan di atas kaidah khusus untuk memperjuangkan menegakkan keadilan tanpa memperhitungkan jumlah imbalan, serta dalam memperjuangkan hak dan kewajiban masyarakat selalu berada dalam bimbingan ulama.

Selama masa dua tahun sampai 1993, LPBH telah menyelesaikan 23 kasus. Tidak banyak, namun cukup berarti untuk sebuah langkah awal. Sebagian besar kasus itu adalah menyangkut masalah pertanahan, kemudian perburuhan pada urutan kedua, dan terakhir kasus yang berkaitan dengan pencemarah lingkungan hidup.⁴³

Akhirnya, bidang garapan NU yang paling menarik untuk dicatat adalah sektor perekonomian, yang membukukan langkah sangat kontroversial di tahun 1990. Sebenarnya di bidang

⁴³Untuk ulasan lebih lengkap mengenai LPBH ini, lihat antara lain Bangkit, Maret-April 1993.

ini NU menghadapi masalah dilematis pada tingkat realisasi dan aplikasi program. Dalam periode 1984-1989 NU boleh dikatakan gagal mewujudkan program ekonominya. Setidaknya, belum ada pola pengembangan yang dapat secara representatif menggambarkan dan mampu mengalokasikan kegiatan ekonomi NU, serta menggerakkan produktifitas warganya. Penyebabnya untuk sebagian adalah karena program hasil Mukktamar 1984 terlalu idelistis sehingga sulit diterjemahkan dalam langkah-langkah operasional. Karena itu dalam mukktamar 1989 mula diupayakan rumusan program baru yang realistis dan konkret, sesuatu yang ternyata mampu membawa pada langkah yang lebih berarti.

Aktifitas NU di bidang ekonomi yang mempunyai cakupan paling luas adalah pada hal-hal yang sifatnya advokasi dan arbituasi⁴⁴. Di wilayah-wilayah NU pada umumnya telah dibentuk lembaga-lembaga perekonomian yang berupa kelompok-kelompok usaha bersama, yang banyak melakukan jasa pembentukan badan-badan usaha yang bersurat-surat lengkap. Selama ini, banyak pengusaha kecil NU yang sangat informal, yang tidak memiliki surat ijin lokasi tempat usaha mereka, apalagi surat ijin usaha. Langkah lain adalah melakukan konsolidasi pengusaha-pengusaha retail, yang dalam

⁴⁴Wawancara Penyusun dengan Drs. H. Ali Maschan Moesa, Wakil Ketua Katib Syuriah PWNU Jawa Timur di kediamannya pada tanggal 01 Juli 1997.

lingkungan NU sangat potensial. Yang tidak kalah penting adalah penyuluhan kewirausahaan, yang meliputi tuntunan bagaimana prosedur untuk memperoleh kredit (banyak pengusaha kecil NU yang semata-mata hanya menggunakan modal sendiri), bagaimana memperoleh keuntungan lebih besar, sebab banyak warga NU yang melakukan usaha sekadar sebagai ikhtiar yang tidak terlalu mengutamakan keuntungan, bagaimana membangun jaringan pemasaran dan sebagainya.

Namun tidak diragukan lagi, langkah yang paling mengesankan adalah ketika NU mendirikan bank-bank perkereditan rakyat, yang dimulai saegera setelah muktamar Krapyak. Tanggal 20 Februari 1990, atar kerjasama NU dengan seorang pengusaha non-pri, di Krian Jawa Timur, diresmikan BPR Nilaiarta yang sampai tanggal peresmian ini saja telah mengumpulkan depositi sebesar 1,4 Milyar rupiah. Disini NU telah mendahului Muhammadiyah, yang sejak beberapa bulan sebelumnya merencanakan pendirian bank, tapi ternyata masih menghadapi beberapa kerumitan, seperti rekrutmen dan pelatihan karyawan. Pasalnya adalah, Muhammadiyah tidak mencoba kerjasama dengan pengusaha seperti halnya NU, sehingga semua harus dimulai dari nol.

Tentu dapat diterka jika pendirian BPR Nilaiarta akan mengundang kontroversi. Masalahnya tidak lain adalah soal halal-haramnya bunga bank yang masih diperdebatkan. Ketika itu KH. Ali Yafie, masih Wakil Rais Aam, merasa perlu

memberikan penjelasan bahwa bank bukan merupakan hal baru dan tabu bagi NU.⁴⁵ Mukhtamar NU di Banten pada tahun 1938 pernah memutuskan bahwa bank bukan sesuatu yang terlarang. Berdasarkan keputusan itu, NU pada tahun 1950-an pernah mendirikan Bank Nusantara dan Bank Haji. Semuanya memakai bunga. Namun karena kelemahan manajemen, akhirnya bangkrut seperti juga bank muallimin yang didirikan dekade berikutnya. Belajar dari kesalahan itu, manajemen BPR Nilaiarta ditata dengan sangat hati-hati, dan karena itu NU mengambil langkah kerjasama dengan pengusaha yang telah berpengalaman.

Akan tetapi beberapa bulan kemudian, dengan segera jelaslah bahwa BPR Nilaiarta terutama telah dimaksudkan sebagai sebuah test case sebelum NU mengambil langkah yang lebih besar.

Tanggal 1 Juni di Jakarta ditandatangani perjanjian kerjasama NU dengan Bank Summa untuk mendirikan 2.000 BPR dalam jangka dua puluh tahun. Walaupun kerjasama ini telah disetujui prototipenya di Krian, tapi dilingkungan PBNU rupanya masih terjadi pertentangan seputar persoalan apakah BPR yang akan didirikan menggunakan sistem bunga atau tidak. Setelah melampaui serangkaian perdebatan, Rapat Gabungan Syuriah dan Tanfidziyah pada tanggal 30 Mei

⁴⁵Lihat Tempo, 10 Maret 1990.

memutuskan untuk meneruskan proyek BPR itu, yang setidaknya untuk sementara, masih memakai bunga. Rupanya bagi NU ada dua pilihan yang sama-sama berat: mendirikan BPR dengan bunga, atau membiarkan sebagian warganya tetap berada di bawah tekanan lintah darat.⁴⁶

Untuk operasionalisasi kerjasama itu sebelumnya NU telah mendirikan PT Duta Dunia Perintis.⁴⁷ Lalu untuk melaksanakan pendirian BPR-BPR, direncanakan dibuat sebuah *holding company*, PT Nusuma Utama. Komposisi sahamnya adalah, PT Duta Dunia Perintis memegang 60 %, dan PT Bank Summa 40 %. Ditargetkan pada kurun waktu kurang lebih tigapuluh tahun 40% saham yang ada ditangan Bank Summa itu secara bertahap akan dialihkan kepada warga. Sebenarnya, NU pernah menawarkan kerjasama pendirian BPR itu kepada beberapa bank pemerintah seperti Bank Bumi Daya dan Bank Dagang Nasional, juga kepada Bank Susila Ekti yang telah mempraktekkan sebuah Bank Islam. Namun yang bersedia adalah Bank Summa, dan sekaligus dinilai lebih memiliki kelayakan

⁴⁶Lihat Tempo, 9 Juni 1990.

⁴⁷Dalam akte notarisnya disebutkan bahwa PT Duta Dunia Perintis didirikan oleh KH. Ahmad Siddiq dan KH. Abdurrahman Wahid masing-masing sebagai Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah NU. Komisarisnya terdiri dari Yusuf Hasyim, Hasyim Latief, Ma'ruf Amin dan Mustafa Zuhad, serta komisaris Utamanya Saiful Mujab. Direktur Utamanya dijabat oleh Ali Usman. Sedang modal pertamanya disetor sebesar Rp. 100 juta dengan komposisi: Rais Aam Rp. 30 juta, Ketua Umum Tanfidziyah Rp. 20 juta, dan anggota Rp. 50 juta.

bagi kerjasama itu.⁴⁸ Sebuah penelitian yang kemudian terbukti kurang tepat.

Bartu sembilan BFR yang terealisasi, pada tahun 1993, ketika Bank Summa menghadapi persoalan sedemikian rupa sehingga ia harus dilikuidasi, dan semua target yang telah ditetapkan, hampir-hampir tidak lagi relevan. Untungnya, beberapa waktu sebelum tim likuidasi mengambil alih aset Bank Summa, bank ini menyelesaikan kerjasamanya dengan NU, dengan saran supaya NU mencari *partener* lain yang bisa menggantikan Bank Summa dan membeli sahamnya di PT Nusumma Utama. Lalu terpilih PT Jawa Pos, dan selanjutnya dilakukan berbagai persetujuan dan perombakan PT Nusumma Utama. Diangkat Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama yang baru, sementara Komisaris Utamanya tetap Abdurrahman Wahid.⁴⁹

Persoalan yang tidak terduga ini menyebabkan

⁴⁸ Abdurrahman Wahid menyebutkan empat alasan mengapa dia memilih Bank Summa. *Pertama*, Kelompok Astra yang menaungi Bank Summa tidak bergerak atas dasar monopoli, serta sangat sedikit memanfaatkan jasa baik dan fasilitas pemerintah. *Kedua*, Bank Summa kuat, mempunyai afiliasi dengan bank-bank mereka yang lain di luar negeri, dan bergabung dalam Summa Internasional. *Ketiga*, mereka memiliki kaitan dengan bank-bank besar di seluruh dunia. Dan *keempat*, mereka mempunyai strategi yang jelas dan dana yang besar yang hendak dikembangkan dengan jalan membuka cabang-cabang kecil. Lihat wawancara dengan Abdurrahman Wahid dalam Tempo, Op. Cit.

⁴⁹ Wawancara penyusun dengan Drs. Ali Maschan Moesa, Wakil Ketua Katib Syuriyah PWNU Jawa Timur di kediamannya pada tanggal 01 Juli 1997.

perkembangan BPR Nusumma secara kuantitatif jadi tersendat. Sampai saat ini baru berhasil didirikan dua BPR baru, sehingga seluruhnya berjumlah sebelas BPR yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Barat. Namun, meskipun demikian, prospeknya dapat dikatakan cukup baik. Sistem kerjanya sudah dimiliki, segmen nasabahnya juga sangat jelas, tenaga kerjanya sudah tersedia. Jika dulu tenaga kerjanya mayoritas dari Bank Summa, kini 95 % adalah tenaga kerja yang direkrut oleh PBNU, setelah diuji komitmen keislamannya, ke-NU-annya, dan sudah barang tentu keterampilan perbankan. Tiap BPR praktis telah beroperasi sendiri-sendiri, dan PT Nusumma Utama hanya mengandalkan sistem operasi, jenjang karier karyawan, dan mutasi-mutasi antar BPR.

Belakangan, rupanya mulai terpikirkan tentang diversifikasi. PT Nusumma Utama sebagai *holding company*, dengan anak-anak perusahaannya, telah merencanakan pembuatan anak perusahaan lagi, yakni berupa *trading house* yang ditangani oleh tenaga-tenaga profesional di bidangnya.

C. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN

Sebuah ilustrasi. Dalam sebuah wawancara ditanyakan kepada Letjen R. Hartono, Kasospol ABRI, apakah dia warga NU. Dengan yakin, barangkali di luar dugaan pewawancaranya sendiri, Hartono menjawab bahwa dia lahir di Madura, dan

"kalau orang Madura bukan NU, namanya bukan orang Madura".⁵⁰

Ilustrasi ini tampaknya sederhana, akan tetapi makna implisit yang dibawanya tidak dapat disebut sederhana. Hartono, adalah putera seorang kyai Madura, pastilah sejak lama memiliki identifikasi kultural ke NU. Tapi tampaknya sulit dihayangkan bahwa seorang jendral akan secara terang-terangan mengakui dirinya NU, sebelum lahir keputusan ke khittah. Sebabnya adalah pernah menjadi Parpol, sehingga selama beberapa waktu tidak ada elit politik nasional, baik sipil terlebih lagi militer, yang mau mengaku sebagai warga NU. Padahal secara kultural banyak di antara mereka melaksanakan "tradisi NU". Berbeda halnya dengan mereka yang tidak ragu-ragu untuk menyebut dirinya Muhammadiyah, jika memang mereka begitu. Sehingga salah satu keuntungan NU setelah kembali ke khittah adalah mencairnya eksklusifitas politik itu, dan mulai lunturnya kesan sebagai oposan pemerintah yang pernah melekat pada diri NU.

Keuntungan selanjutnya, kian menyebarnya warga NU baik ke PPP, Golkar, dan PDI telah semakin memperkuat bargaining position NU serta memperluas jaringan lobi, yang telah dipilih NU sebagai cara untuk mempengaruhi

⁵⁰Lihat wawancara dengan Kassospol ABRI Letjen R. Hartono dalam Forum Keadilan, 17 Februari 1994.

kebijaksanaan pemerintah. Dan sekalipun NU tidak lagi menjadikan perolehan kursi jabatan publik sebagai ukuran sukses politiknya, namun penyebaran ke tiga OPP rupanya telah menjamin warga NU untuk tetap memiliki akses ke kursi di lembaga legislatif. Sudah tentu lalu dapat diajukan argumen bahwa warga dan tokoh ormas lainnya, terutama Muhammadiyah, cukup banyak yang duduk di kursi DPR atau MPR, dan itu tidak bisa serta-merta dianggap sebagai sebuah keuntungan politik bagi ormas tersebut. Memang benar, akan tetapi tokoh-tokoh Muhammadiyah yang duduk di lembaga legislatif pada umumnya adalah karena kapasitas diri pribadinya, sebagai pakar, budayawan, dan seterusnya, serta bukan karena kepemimpinannya atas komunitas tertentu dalam masyarakat. Berbeda halnya dengan NU. Tokoh-tokohnya yang duduk di legislatif, baik melalui ketiga OPP maupun sebagai utusan daerah, seringkali adalah kyai atau ulama yang pada cakupan lokalnya masing-masing merupakan pemimpin umat atau setidaknya pesantren, yang itu adalah sel-sel dalam organisme bernama NU. Artikulasi kepentingan warga NU ini dengan demikian akan lebih meluas daripada ketika mereka hanya dapat terwakili melalui PPP dahulu.

Bagi ulama-ulama NU sendiri, khittah yang membawa NU pada kedudukan di luar politik praktis memberi resultensi hilangnya sekat-sekat untuk memimpin umat Islam tidak hanya di PPP namun di kedua lainnya bahkan ABRI. Popularitas KH.

Zainuddin MZ yang luas di semua kalangan umat Islam Indonesia, untuk sebagian dapat dijelaskan dalam perspektif ini.

Lalu keuntungan berikutnya, kalangan NU sendiri merasa bahwa khittah sebenarnya lenih mendekatkan NU kepada cita-citanya. Mereka melihat bagaimana ikhtiar-ikhtiar NU bisa berjalan lancar. Sesuatu yang mahal harganya sebelum kembali ke khittah. Dahulu jika NU hendak mengadakan dakwah misalnya, ijinnya bisa sangat berbelit-belit dan mesti menunggu hingga berbulan-bulan untuk turun. Sementara itu pembicara yang akan menyampaikan dakwahnya pun biasanya melewati seleksi yang ketat. Kesulitan semacam itu sekarang sudah tidak terjadi. Salah satu tehnik yang digunakan NU adalah bekerjasama dengan elit ABRI, yang pernah disalah-tafsirkan orang sebagai kolusi antara Abdurrahman Wahid dengan Benny Moerdani. Telaah politik sebenarnya adalah, pimpinan formal ABRI adalah Beny. Dan larangan-larangan terhadap NU dulunya selalu berasal dari aparat-aparat militer. Jadi daripada mencari penyelesaian dengan mendekati aparat militer di bawah, NU rupanya lebih memilih pendekatan langsung kepada Panglima ABRI. Pada mulanya adalah kedekatan pribadi antara pemimpin NU dengan pimpinan ABRI. Namun selanjutnya hal itu diperluas dengan pendekatan NU dan ABRI secara kelembagaan. Di sinilah dapat dijelaskan mengapa Pangab, Kassospol ABRI, Pangdam V Jaya tidak

mempersulit rencana pelaksanaan Rapat Akbar '92, ketika Mendagri, dan Menko Polkam masih ragu-ragu untuk memberikan ijin.

Namun di samping keuntungan-keuntungan di atas, kerugian bukan berarti tidak ada, setidaknya pada masa awal ketika warga mesti beradaptasi dengan warna baru kepolitikan NU. Kesulitan muncul, seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya, berkaitan dengan sifat paternalistik warga NU. Mereka terbiasa mengikuti sebuah patron, termasuk ketika pilihan politik harus dilakukan. Ketika Khittah memberikan kebebasan kepada warga untuk menentukan sendiri saluran aspirasi politiknya, selama beberapa waktu mereka justru merasa kebingungan, dan perlu menunggu waktu tidak kurang dari delapan tahun hingga tahun 1992 sampai mereka dapat memahami makna kebebasan itu.